PENGARUH KEWAJIBAAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAN PAJAK

Totok Mardianto
Universitas Teknologi Surabaya
Email: totokk.2015@gmail.com

ABSTRACT

In the current era, taxes play a crucial role as a source of domestic state revenue. This study aims to analyze the impact of the obligation to possess a Taxpayer Identification Number (NPWP), tax audits, and tax collection activities on tax revenue. The respondents in this study are tax officials (tax authorities) from the Primary Tax Service Offices (KPP Pratama) in the North Sidoarjo region. The sample consists of 70 tax officials from three Primary Tax Service Offices within the North Sidoarjo area. Multiple regression analysis is the method used in this study. The research results indicate that the obligation to possess a Taxpayer Identification Number (NPWP), tax audits, and tax collection have a significant positive effect on tax revenue, with tax collection showing a coefficient of 0.305. This study supports the research conducted by Syahab and Gisijanto (2008) and Titin Vegirawati (2011).

Keywords*: Obligation to possess an NPWP, tax audit, tax collection, and tax revenue*.

ABSTRAK

Didalam era sekarang ini , peranan pajak sangatlah berperan penting bagi salah satu pemasukan negara dari dalam negeri . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak . Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama Wilayah Sidoarjo Utara . Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 70 pegawai pajak dari tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Sidoarjo Utara . Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP , pemerikasaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan sebesar (0,305) . Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) dan Titin Vegirawati (2011).

Kata kunci : Kewajiban kepemilikan NPWP , pemeriksaan pajak , penagihan pajak dan penerimaan pajak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang , sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju . Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang , di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada , salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi , untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi terbesar dan yang efektif . Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri . Karena pajak merupakan penerimaan langsung

yang segera bisa diolah guna untuk pembiyayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012)

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan neara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120). Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak , pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak . Sebelum membbuat kebijakan – kebijakan tersebut , ada beberapa hal yang haruus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan . Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak . faktor –faktor yang dapat mempegaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah , petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengobtimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007:3) . Pada tahun 2008 pemerintah melaui Direktorat Jenderal Pajka mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy . Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat . Dalam sunset policy , pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik , 2009:89)

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment , wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk NPWP . Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak , yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Casavera, 2009:4)

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan . Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar . surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak . Berdasarkan hasil penelitian petugas seksi tata usaha perpajakan , kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak . Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku , sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamnakan penerimaan pajak . Semakin banyak

yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat , penerimaan pajak meningkat (Setiawan , 2007:59)

Dirjen Pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha .Hal ini disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang didapat dipergunakan nya . Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi . Untuk menghadapi kemungkinan tersebut ,mpemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaanpajak yang berasal dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yangmemiliki NPWP . Oleh karena dalam UU PPh terbaru , pemerintah melalui Dirjen pajak berupaya menjaring wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP . Jumlah pemilik NPWP , jumlah pemilik NPWP tahun 2008 dan 2009 yaitu sebesar 10,682 juta dan 14,083 juta (Vivanews , 22/6/2009) . Direktorat Jenderal pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia per 30 September 2010 mencapai 18,774 juta NPWP (Vivanews ,8/10/2010) , Sedangkan pemilik NPWP mencapai 19.410 juta wajib pajak per 28 Februari 2011 (Kabarbisnis , 8/4/2011) . Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pemilik NPWP mencapai 23,89 juta pajak .go.id , 30/5/2012

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) , pemerintah juga perlu meningktkn penegkan hukum lin . Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan . Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dankelengkapan pelaporan penghasilan ., penyerahan , pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP yang diperiksa .

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sma dimasa depannya . Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak . Selain itu sering kalijuga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan , oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pua dilakukan pemeriksanaan . Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka pembinaan , penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak , Direktorat Jenderal pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak ini merupakan komponen official assesment . Surat ketetapan pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang . Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksanaan yaitu fungsional pemeriksa

pajak baik yang berada di kantor pelayanan , kantor wilayah , maupun kantor pusat . Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak . Surat Pemberitahuan pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak . Pada saat penerimaan SPT tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom – kolom yamg terdapat pada SPT tersebut . Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam , namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki (Purba, 2012:2) .

Pada tahun 2012 konsultan pajak PT Mutiara Virgo , Hendro Tirta wijaya ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan Dhana Widyatmika . hendro memiliki keterkaitan dengan tersangka Direktur Utama PT Mutiara Virgo Jhonny Basuki (JB) dan Herly Isdiharsono (HI) , rekan Dhana di Direktorat Jenderal Pajak , tepatnya di KPP Kebon Jeruk . Hendro berasal dari PT Ditax Management Resolindo . Dalam dakwaan Dhana di pengadilan tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa ia bersama rekan satu perusahaannya Zemmy Tanumiharja berpura-pura sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo . Hendro lalu bekerja sama dengan Herly untuk membantu mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan Johny pada negara . Ia bertugas melakukan negoisasi dengan tim peneriksa pajak yang diwakili oleh herly . atas negoisasi ini , jhony membayarkan fee untuk petugas pajak yang membantu mengurangi pajaknya . Semua uang Jhony digelontorkan melalui Hendro dan diberikan pada Herly untuk dibagi-bagikan . Termasuk untuk Dhana , meskipun pria asal Malang itu bekerja di KPP Pancoran . Dhana mendapat jatah Rp3,4 miliar saat itu . Namun dalam dakwaannya memang tak dijelaskan mengapa ia turut menikmati gratifikasi dari Jhonny , padahal ia bekerja di KPP yang berbeda . Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak , Dhana Widyatmika dituntut hukuman 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara , majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diminta menjatuhi hukuman membayar denda Rp 1 miliar dan subsider kurungan enam bulan (JPNN.Com, 10/7/2012)

Selain pemeriksaan pajak , ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (ginting, 2006: 12) . Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa . Maka dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat ,

pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa . Menurut Undang – undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksut dengan penagihan pajak adalah :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus , memberitahukan surat paksa , mengusulkan pencegahan , melaksanakan penyitaan , melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita .

Oleh karena itu dengan dikeluarkan undang – undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagai ana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotifasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarakan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul , maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak ?

b. Variabel bebas manakah yang paling dominan memepengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Sidoarjo Utara ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara , penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negar . Banyak para ahli memberikan batasan tentangpajak , tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama . Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli , yaitu :

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R.Santoso Brotodiharjo , pajak adalah peralihan kekayaan dari ihak rakyat kepada kas negara untuk membiyayaipengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiyayai publik invesment .

Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya , secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1) , yaitu :

-Fungsi penerimaan (Budetari) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk

membiyayai pengeluaran- pengeluarannnya .

-Fungsi Mengatur (Regulatory) Pajak sebagai alat untukmengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi . Contoh : pajak yang tinggi dikarebnakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsomsi minuman keras , pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk eksport sebesar 0% untuk mendorong eksport produk Indonesia di pasaran dunia .

Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo,2009:7) Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya , baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri . Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, Asas sumber . Negara berhak mengenakanpajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak, Asas kebangsaan . Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara .

Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi , 2009:9)

– Stelsel Pajak .

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan :

-Stelsel Nyata (riil stelsel)

-Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2009:7)

1) Official Assessment System

2) self Assessment Sysstem

3) With Holding Syistem

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2009:23) .

Menurut Resmi (2009: 26) , nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak . Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan berdasarkan sistem self assesment , wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) . Persyaratan objektif adalah persyaratan untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) . Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan / pungutan sesuai dengan ketentuan Undang – undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan setiawati , 2009:4)

Tata cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi formulir permohonan pendaftaran wajib pajak dan atau formulir permohonan pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajakatau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak . Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain , harus memiliki surat kuasa khusus .

Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu : Sarana dalam administrasi perpajakan, Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya: Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak pengawasan administrasi perpajakan

Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dikutip dari Pardiat (2008:11) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .”

Menurut Priantara (2000:24) , pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak . Untuk itu dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif . Sedangkan menurut Pardiat (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku , dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan

perpajakan .

Tabel 2.1
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

No	Peraturan	Tanggal	Terutang
1	UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2	PP No.80 Tahun 2007	01/01/2008	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3	PMK No. 199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4	Per Dirjen Pajak No. PER_19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor
5	Per Dirjen Pajak No. PER- 20 /PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan kantor
6	PMK No.202 / PMK .03 /2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7	Surat edaran Dirjen Pajak No. .SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk menguji kepatuhan wajib pajak

Sumber : Prastowo, Yustinus (2009:170)

Menurut Rahayu (2010; 246). , tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum , keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No..19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi uang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan pennagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa , mengusulkan pencegaran , melaksanakan penyitaan , melaksanakan penyanderaan , menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197)

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut,menelaah dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencari kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan

sebagainya (Siregar, 2021:2).

Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakterstik tertentu yang ditetapkan olehpeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya . Populasi bukan hanya orang , tetapi juga objek dan benda – benda alam yang laian . Populasi bukan hanya orang , tetapi juga objek / subjek yang dipelajari , tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu (Sugiyono , 2009: 115) . Populasi dalam penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah sidoarjo Utara .

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Nonprobability Samping Design) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur – unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009: 120) . Jenis metode dari nonprobability sampling yang dipilih dlh sampel berdsrkaan kemudhn (convenience smpling) dlh istilh umum yng menckup vrisi lusny prosedur pemilihn responden . convenience smpling berrti unit smpel yng ditrik mudh dihubungi , tidk menyushkn , mudh untuk mengukur dn bersifat kooperatif (Hamid , 2010 :18) . Dengan demikian maka peneliti memilih pelayanan pajak , pemeriksa pajak dan penagih pajak sebagai sampel penelitian . Dalam penentuan kuotanya peneliti ingin menyebar kuesioner ke perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Sidoarjo Utara .

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Sujarweni, 2615:75). Sedangkan yang dimaksud dengan definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana (Sujarweni, 2021:77).

Metode analisis data dan uji hipotesis Metode analisis data

Analisis deskriptif

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini , meliputi : Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono , 2009:103) . Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (Quesstionnaries) dan wawancara (interview) . Kuesioner di distribusikan secara personal , sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden . Kuesioner didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan , pemeriksaan dan diidstribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan , pemeriksaan dan penagihan . Kemudian diolah berdasarkan kriteria

yang telah ditentukan . Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti . (Indriantoro dan Supomo , 2004) . Sekala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval . atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban . Skala likert dikatakan interval karena pernyatan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang 'lebih' tinggi dari ragu – ragu (Gholia , 20: 47) . Dalam penelitian ini , menggunakan SPSS 9.00 untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat mengnlisis perumusan masalah penelitian

Metode analisis data

Uji Statistik Deskriptif

Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilia rata- rata (instrumen), standart devisi , maksimum , minimum (Ghozali , 2011:19)

Uji Kualitas Data

Uji validitas instrumen : Uji validitas digunakan untuk mengukur salah satu valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52) . Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan Person Correlation . Jika korelasi nilai skor masing – masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyan tersebut dikatakan valid , dan sebaliknya (Ghozali, 211 :55).

Uji nurmalitas .

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , variabel penggnggu dan residual memiliki distribusi normal . Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability ploting yang membandingkan distribusi akumulatif dari distribusi normal .

Uji heteroskedastisitas

Uji multgikoloniritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara varibel independen . Jika varibel independen saling berkorelasi , maka varibel – variabel ini tidak orthogonal . Varibel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap petugas pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Sidoarjo Utara . Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah seksi pelayanan pajak , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak . Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui , menjelaskan dan menganalisis pengaruh antar variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan variabel dependent penerimaan pajak . berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada bab – bab sebelumnya maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut .

-Uji statistik deskriptif , dari jumlah responden 70 , variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai minimum sebesardeviasi 3,89 . Sedangkan pada variabel dependen (penerimaan pajak) memiliki nilai minimum 19 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata total jawaban 26,3 dan standart deviasi 2,65.

-Uji validitas dari variabel kewajiban kepemilikan NPWP , semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kewajiban kepemilikan NPWP berada pada tingkat signifikan yaitu dibawah 0,05 disimpulkan valid .

-Uji validitas dari variabel pemeriksaan pajak berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid .

-Uji validitas dari variabel penagihan pajak , berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid .

-Uji validitas dari variabel penagihan pajak butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel penagihan pajak , berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05 , maka disimpulkan valid .

-Uji reliabilitas untuk konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 . Dan sebaliknya reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan tidak baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha < 0,70. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa pernyataan ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,70 . Menunjukkan setiap item pertanyaan digunakan untuk memperoleh data yang konsisten , berarti pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya .

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan informasi yang didapatkan langsung dari karyawan pada KKP Pratama di wilayah Sdoarjo Utara .

1. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan pajak Wilayah Sidoarjo Utara . Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2007) dan Sujatmiko (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak . Kemudian Sukirman (2011) , Listyaningsih (2012) , Herryanto dan Toly (2013) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berhubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak . Begitu pula dengan penelitian Gisijanto (2008) dan Vegirawati

(2011) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak .

2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor pelayanan pajak pratama di wilayah Sidoarjo Utara adalah variabel penagihan pajak dari pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak . Hal ini dapat dari nilai beta penagihan pajak yang paling tinggi

DAFTAR PUSTAKA

Casavera, " Perpajakan " , Cetakan pertama , Graha Ilmu , Yogyakarta , 2009 .

Diana , Anastasia dan Lilis Setiawati , " Perpajakan Indonesia ', Edisi kedua , ANDI, Yogyakarta, 2009

Fitriyani , Dewi , "Peran Savani Dalam Perencanaan Pajak Menghadapi Penerapan UU PPh Tahun 2008 dan Kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi ",ISSN, Vol .100,2009

Fouktone 'Optimalisasi penerimaan pajak melalui pembenahan sistem administrasi pajak .

Ghozali , Imam "Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 19 " Edisi ke Tiga , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang ,2011.

Gizijanto dan Syahab , " Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak " , Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak , 2008

Herryanto , Marisa dan Agus Arianto Toli , Pengaruh kesadaran wajib pajak , kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan ", Tax and Accounting Review , Vol 1, No.1, 2013

Mardiasmo , "Perpajakan " edisi Revisi , Andi , Yogyakarta , 2009

Resmi , Siti "Perpajakan , Teori dan Kasus ", Edisi Kelima , salemba Empat Jakarta , 2009 .

Sujatmiko , Bambang "Kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak dalam pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (Tinjauan terhadap peraturan direktur jenderal pajak nomor 35/PJ/2008)", jurnal socioscientia . Kopertis wilayah XI Kalimantan Vol.3. No.2, 2011

Tansuria , Billy Ivan , "Pokok – pokok ketentuan umum perpajakan (KUP) ". Cetakan pertama , Graha ilmu , Yogyakarta , 2010

Umar, Husein, "Riset sumber daya manusia dalam organisasi (Edisi revisi dan perluasan)" , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta , 2005

Waluyo , "Perpajakan Indonesia ", Salemba Empat , Jakarta ,2009.